

NASKAH PUBLIKASI
PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NELAYAN DI KABUPATEN
NATUNA TAHUN 2016 (Studi Kasus Pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Natuna 2016)

Disusun Oleh:
Wan Wahyu Liandra
NIM: 20120520044

Telah disetujui dan disahkan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 26 April 2018
Tempat : Ruang Referensi IP UMY
Pukul : 14.00 s.d 15.00



Dosen Pembimbing

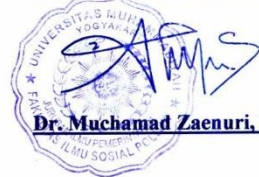
Drs. Juhari Sasmito Aji, M.Si.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Dr. Itha Purwaningsih, S.IP., M.Si.

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

**PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NELAYAN DI
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016(Studi Kasus Pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna 2016)**

Wan Wahyu Liandra

20120520044

Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan adanya peran dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya meningkatkan perekonomian nelayan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

Penelitian ini menggunakan Metode Analisa Kualitatif, data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian, wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat subjek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui permintaan data ke instansi/lembaga terkait dalam hal penyajian data yang dibutuhkan peneliti. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan harapan responden memahami dan mengetahui secara jelas atas permasalahan yang dihadapi tersebut.

Penelitian ini memperoleh hasil yaitu peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna telah menunjukkan rencana kerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai SKPD melalui penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan predikat “MEMUASKAN”. Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna menunjukkan tercapainya optimalisasi sektor unggulan daerah dengan menyerapnya anggaran sebesar 94,48%. Berkembangnya Industri Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) menyerap anggaran sebesar 100%. Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah menyerap anggaran sebesar 98,35%.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna harus menjamin adanya kepastian perencanaan yang telah ditetapkan agar tidak bergeser atau menjadi celah untuk diubah/diganti agar tingkat kepercayaan stakeholder menjadi tetap dan juga pengembangan kualitas SDM baik aparatur dan nelayan perlu untuk menjadi perhatian agar seluruh komponen tersebut menjadi lebih dekat serta anggaran yang telah ditetapkan agar lebih dioptimalkan dengan cara menetapkan rencana kerja yang terukur dan terencana dengan baik agar anggaran yang dikeluarkan lebih efisien, efektif, dan tercapai tujuan serta tepat Sasarannya.

Kata Kunci: Peran, Kelautan dan Perikanan, Perekonomian Nelayan

A. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna mempunyai wilayah yang strategis. Hal ini dikarenakan kabupaten ini tidak hanya terletak pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan, tetapi kabupaten tersebut juga berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Singapura dan Malaysia. Kabupaten ini memiliki 154 pulau dengan 27 pulau berpenghuni dan 127 pulau tidak berpenghuni. Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah 264.198,37 km² dengan luas daratan 2.001,30 km² dan lautan 262.197,07 km². dengan kata lain hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Natuna dipenuhi lautan. Oleh karena itu, Kabupaten Natuna mempunyai potensi kekayaan laut yang tinggi.

Kabupaten Natuna mempunyai sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatan hanya 36%, yang hanya sekitar 4,3% oleh Kabupaten Natuna. Selain itu, Kabupaten Natuna juga memiliki potensi perikanan budidaya meliputi budidaya ikan air laur sebanyak 217,57 ton, budidaya ikan air tawar/payau 217,57 ton dan budidaya rumput laut mencapai 142,36 ton. Sehingga total nilai produksi perikanan budidaya diwilayah Kabupaten Natuna mencapai Rp. 49,464 Miliar. Berdasarkan data-data tersebut seharusnya kekayaan laut Kabupaten Natuna mampu mensejahterahkan masyarakat daerah tersebut.

Namun, daerah ini belum mampu mengoptimalkan kekayaan laut untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagian besar nelayan di Kabupaten Natuna masih menggunakan cara-cara tradisional dalam menangkap ikan. Sehingga mereka tidak dapat menghasilkan tangkapan yang melimpah. Pemerintah Kabupaten Natuna telah mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui kegiatan penyuluhan. Kegiatan ini tidak dapat terlaksana di seluruh wilayah kabupaten Kabupaten Natuna. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga penyuluh untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Faktor yang kedua ialah sarana dan prasarana mempunyai peran strategis dalam meningkatkan produktifitas nelayan. Semakin baik fasilitas yang dimiliki oleh para nelayan maka akan semakin banyak hasil tangkapannya. Dalam hal ini para nelayan di kabupaten Kabupaten Natuna belum didukung oleh sarana dan prasarana yang bagus sehingga mereka belum mendapatkan hasil yang maksimal.

Dan faktor yang terakhir ialah belum adanya tempat penampungan hasil tangkapan nelayan. Tempat tersebut tidak hanya berfungsi untuk menampung hasil tangkapan nelayan tetapi juga berfungsi untuk memasarkan serta mengatur standarisasi harga ikan di Kabupaten Natuna. Hal ini tentu saja berdampak pada perekonomian Kabupaten Natuna.

Salah satu instansi yang berkewajiban untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut ialah dinas kelautan dan perikanan Kabupaten

Natuna. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan kewenangan otonomi di bidang kelautan dan perikanan yang merupakan tugas dinas kelautan dan perikanan serta berfungsi sebagai perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna merupakan salah satu bentuk instansi pemerintahan yang konkrit tindak lanjut dari kebijakan yang akan menjadi arah penetapan kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kabupaten Natuna. Berdasarkan Peraturan ini Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta berjalannya tata laksana dan tata kerja kedinasan maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kabupaten Natuna dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai visi yaitu “Memberdayakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan,

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Natuna No. 11 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna

Menuju Kabupaten Natuna Yang Sejahtera, Merata dan Seimbang”. Dalam mencapai visi yang telah dibuat maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna menetapkan misi dalam memberi arah kebijakan bagi pembangunan disektor perikanan, adapun misi tersebut yang pertama, Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap secara optimal dan lestari. Yang kedua, Peningkatkan penyediaan infrastruktur pendukung hasil Perikanan. Yang ketiga, Mewujudkan Penegakan supermasi hukum dan pengawasan bidang Kelautan dan Perikanan terutama berkaitan dengan *Illegal Fishing*. Dan yang keempat, Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dinas kelautan dan perikanan. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana peran dinas kelautan dan perikanan kabupaten Kabupaten Natuna dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian nelayan di Kabupaten Natuna.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan perekonomian nelayan di Kabupaten Natuna tahun 2014-2016?”

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam psoses penyelesaian penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *deskriptif Kualitatif*. Artinya, data yang dikumpulkan bukan

berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan *later alamiah* dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada.² Tujuan menggunakan pendekatan *kualitatif* adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dalam meningkatkan perekonomian Nelayan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti meneliti beberapa obyek diantaranya di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna serta kondisi alamiah di lingkungan nelayan yang dapat mendukung peneliti dalam mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Disini peneliti mencari fakta tentang bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan perekonomian nelayan di Kabupaten Natuna dengan

² Moleong. Lexy J, 2012, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (cetakan ke-30), Bandung , Hal. 5

intepretasi yang tepat, serta akan mempelajari masalah yang terjadi di lapangan, termasuk didalamnya adalah kegiatan, pandangan, sikap, serta proses yang berlangsung dalam meningkatkan perekonomian nelayan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

C. Pembahasan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dari tahun 2014-2016 telah berupaya menunjukkan rencana kerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai SKPD selama ini menunjukkan hasil kinerja yang baik. Ini dilihat dari hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dalam 4 (empat) tahun, telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya melakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan mulai dari tahun 2013-2016 telah menunjukkan suatu hal yang cukup bagus, walaupun masih ada beberapa program dan kegiatan yang kadang-kadang sering muncul dan menghilang seiring dengan adanya perubahan alokasi anggaran yang ditetapkan. Pendorong dalam program dan kegiatan yang tidak dapat disejalankan akan menempuh jalur yang lebih tinggi yaitu melalui program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang sering memunculkan program sejenis sebagai pengganti dari adanya beberapa program yang terpaksa dihilangkan sementara waktu dalam tahun tersebut.

Adanya beberapa program yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna yang terintegrasi dengan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai antisipasi dengan beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Natuna terkait dengan terjadinya defisit anggaran. Perubahan kebijakan terkait dengan anggaran, perlu adanya program pendampingan terhadap nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ini menunjukkan adanya beberapa tindakan komunikasi terjalin dengan baik antara stakeholder terkait dengan pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan. Adanya variasi dalam menetapkan sasaran juga dirasakan perlu untuk dipertimbangkan karena pihak tertentu akan menilai kinerja SKPD akan menjadi menurunkan tingkat kepercayaan pada stakeholder terkait. Sehingga nelayan dalam hal ini yang paling merasakan dampak yang paling cepat dan bahkan menunbuhkan rasa ketidakpercayaan lagi terhadap program dan kegiatan yang sering dikategorikan tidak populer.

Secara umum sasaran yang tepat akan mampu mempengaruhi setiap *stakeholder* dalam membaca peluang yang ada sebagai pedoman dalam mengambil langkah-langkah kongkrit dalam meningkatkan perekonomian dalam bidang kelautan dan perikanan. Adanya komitmen bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan mampu untuk menjawab tantangan dan peluang yang akan diraih ke depannya.

Tersedianya anggaran yang memadai dan sumber daya manusia mumpuni juga akan menunjukkan hasil kinerja yang baik, baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan bahkan hasil yang akan dicapai. Selain itu juga upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan yang ada di Natuna perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan adanya program bantuan alat tangkap dan alat bantu tangkap yang selama ini telah disalurkan ke kelompok nelayan agar lebih selektifitas, agar sasaran yang ingin dicapai lebih tepat menjangkau ke kelompok yang lebih produktif dengan volume hasil tangkapan yang terus meningkat. Ini akan mampu mendorong pola pikir nelayan yang lebih modern dalam mengikuti adanya perubahan baik dalam penggunaan alat tangkap maupun pola tangkap mereka yang lebih efisien dan efektif dalam menggunakannya.

Upaya dalam mempengaruhi program kerja agar menjadi lebih baik, tentunya memerlukan suatu strategi yang ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (*internal*) meliputi faktor kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) maupun dari luar (*external*) yaitu faktor peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)

Segala sesuatu yang dipandang sebagai kekuatan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna yang ditinjau dari aspek kepentingan seluruh stakeholder pemerintah daerah sebagai berikut:

- 1). Wilayah laut Kabupaten Natuna yang sangat luas (98,98%);
- 2). Potensi sumberdaya alam sektor perikanan yang cukup besar;
- 3). Potensi sumberdaya manusia (nelayan) tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
- 4). Kemampuan keuangan daerah cukup memadai;
- 5). Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan yang cukup baik.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Adapun kelemahan sebagai sisi negatif yang ada di lingkungan strategic pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang dapat diperbaiki sebagai berikut:

- 1). Aturan hukum bidang kelautan dan perikanan (perda) masih kurang;
- 2). Kewenangan pusat di daerah masih besar (perizinan);
- 3). Ketersediaan data dan informasi pemanfaatan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan masih terbatas;
- 4). Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (TPI, Pelabuhan, Pabrik Es, Pangkalan BBM dan lain-lain) masih kurang;
- 5). Bimbingan teknis, bantuan modal usaha dan kelembagaan nelayan masih kurang.

3. Peluang (*Opportunities*)

Adapun peluang atau kesempatan yang baik untuk meminimalisir kelemahan yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, yaitu:

- 1). Otonomi daerah memberikan izin bagi daerah dalam pengelolaan wilayah sendiri;
- 2). Tingginya permintaan pasar terhadap komoditi perikanan;
- 3). Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan;
- 4). Investasi dari investor luar daerah;
- 5). Meningkatkan pendapatan asli daerah;
- 6). Menyerap tenaga kerja yang tinggi.

4. Ancaman (*Treats*)

Adanya pengaruh dari luar yang dapat menimbulkan dampak negative sehingga menjadi ancaman, yaitu:

- 1). Kondisi geografis wilayah yang sulit;
- 2). Terjadinya illegal fishing dan konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- 3). Lemahnya pengawasan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan belum terpadu;
- 4). Posisi wilayah di daerah perbatasan dan lintasan perdagangan Internasional.

Berdasarkan analisa SWOT diatas, dapat disusun suatu formulasi strategis dengan menginteraksikan faktor-faktor internal yang menjadi faktor penentu keberhasilannya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna sebagai berikut:

1. Meningkatkan usaha pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efektif, efisien, berkelanjutan dan lestari.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada bidang kelautan dan perikanan, dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi birokrasi dan *good governance*;
3. Penyusunan data base dan sistem informasi kelautan dan perikanan;
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta para pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan;
5. Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum sektor kelautan dan perikanan.

Berdasarkan analisa diatas, maka strategi yang dapat diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna pada tahun 2014-2016, yaitu:

1. Strategi Internal

STRATEGI SO		STRATEGI ST	
1	Pengembangan industri perikanan yang lebih mendorong penciptaan lapangan kerja	1	Penegakan hukum dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2	Pengembangan usaha pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara optimal dan lestari;	2	Peningkatan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
3	Meningkatkan pola kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;	3	Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara terpadu;
4	Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur;	4	Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
5	Meningkatkan peluang usaha dan iklim Investasi sektor Kelautan dan Perikanan;	5	Penambahan jumlah PPNS Perikanan Kabupaten Natuna.
6	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana produksi pengelolaan hasil perikanan;		
7	Peningkatan bantuan pinjaman modal usaha bagi nelayan.		

Sumber: Renstra DKP Tahun 2011-2016, 2016

2. Strategi Ekternal

STRATEGI WO		STRATEGI WT	
1	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung sektor Kelautan dan Perikanan;	1	Pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) bidang Kelautan dan Perikanan tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
2	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam;	2	Peningkatan pendediaan sarana dan prasarana produksi dan pengelolaan hasil perikanan;
3	Peningkatan penyediaan data dan informasi sektor kelautan dan perikanan;	3	Memacu pengembangan ekonomi masyarakat nelayan pesisir dan pulau-pulau kecil;
4	Peningkatan kemampuan teknis dan modal usaha nelayan (masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil);	4	Mendorong pertumbuhan sentra produksi kelautan dan perikanan;
5	Peningkatan peran serta masyarakat (nelayan) dalam bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.	5	Sinkronisasi program kelautan dan perikanan di tingkat provinsi maupun tingkat pusat.

Sumber: Renstra DKP Tahun 2011-2016, 2016

Pencapaian program kerja yang telah dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna selama beberapa tahun ini dapat terlihat pada tabel 3.9 berikut:

**Capaian Kinerja Tahunan Pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2013-2016**

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Sasaran	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2013	4	13	36	26,237,089,078.00	23,349,885,764.00	2,887,203,314.00	89,00
2	2014	5	10	31	21,869,950,975.00	19,715,975,293.00	2,153,975,682.00	90,15
3	2015	3	11	28	14,633,223,603.00	11,277,613,403.00	3,355,610,200.00	77,07
4	2016	3	8	20	26,120,264,400.00	24,793,069,539.00	1,327,194,861.00	94,92

Sumber: Lakip 2013-2016 DKP Kab. Natuna (diolah)

Dari tabel 3.9 menunjukkan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dari tahun 2013-2014, terjadi kenaikan, walaupun pada tahun 2015 terjadi penurunan yang diakibatkan oleh berkurangnya alokasi anggaran yang disebabkan oleh defisitnya APBD Natuna pada saat itu.

Alokasi anggaran yang pada tahun 2016 sebesar Rp. 26.120.264.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.793.069.539,00 dengan capaian kinerja mencapai angka yang cukup memuaskan, yaitu 94,92% dengan predikat penilaian “MEMUASKAN”.

Selain itu juga didukung dengan 3 sasaran untuk beberapa misi yang dikatakan menunjukkan adanya komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dari kepala dinas maupun dukungan staf/pegawai. Alokasi anggaran yang telah dialokasi, jika dikaitkan dengan misi dan

sasaran yang dicapai menurut misi dan sasaran tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**Capaian Kinerja Tahunan Berdasarkan Misi dan Sasaran Strategis
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2014**

MISI	TUJUAN	SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI PERTAMA	Tujuan 1	Meningkatkan Usaha Pemanfaatan dan Pengolahan	95,79
Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Secara Optimal dan	Terwujudnya Sentra-sentra Ekonomi Rakyat		
MISI KEDUA	Tujuan 2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bidang Kelautan dan Perikanan	92,62
Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Hasil Perikanan	Tercapainya Optimalisasi Sektor Unggulan Daerah		
		Terjaminnya Distribusi dan Pemasaran Hasil Pengolahan Industri	96,68
MISI KETIGA	Tujuan 3	Menurunkan Illegal Fishing	59,37
Penegakkan Supermasi Hukum Bidang Perikanan	Terciptanya Aktivitas Pembangunan yang Sesuai dengan Potensi dan Karakteristik		
MISI KEEMPAT	Tujuan 4	Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Perikanan	95,88
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	Tersedianya Tenaga PPL Bidang Perikanan		

Sumber: Lakip Tahun 2014 DKP Kab. Natuna (diolah)

Dari tabel diatas, dapat menunjukkan bahwa dari APBD Natuna tahun 2014 sebesar Rp.21.869.750.975,00 dengan realisasi sebesar Rp.19.715.975.293,00. Dikaitkan dengan pencapaian misi dan sasaran yaitu Terwujudnya Sentra-sentra Ekonomi Rakyat dengan anggaran sebesar Rp.4.037.046.600,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.866.966.816,00 atau sebesar 95,79%. Tercapainya Optimalisasi Sektor Unggulan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.10.923.481.375,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.117.501.660,00 atau sebesar 92,62%. dan Terjaminnya Distribusi dan Pemasaran Hasil Pengolahan Industri dengan anggaran sebesar Rp. 831.608.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 803.995.300,00 atau sebesar 96,68%. Terciptanya Aktivitas Pembangunan yang sesuai dengan Potensi dan Karakteristik Wilayah dengan

anggaran sebesar Rp.2.464.373.900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.463.186.530,00 atau sebesar 59,37%. Tersedianya Tenaga PPL Bidang Perikanan dengan anggaran sebesar Rp.3.613.242.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.464.324.987,00 atau sebesar 95,88%.

**Capai Kinerja Tahunan Berdasarkan Misi dan Sasaran Strategis
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2015**

MISI	TUJUAN	SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI PERTAMA	Tujuan 1	Meningkatkan Usaha Pemanfaatan dan Pengolahan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	87,96
Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Secara Optimal dan Lestasi		Tercapainya Optimalisasi Sektor Unggulan Daerah	
MISI KEDUA	Tujuan 2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bidang Kelautan dan Perikanan	65,05
Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Hasil Perikanan		Berkembangnya Industri Berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	
MISI KETIGA	Tujuan 3	Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Perikanan	89,74
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah	

Sumber: Lakip Tahun 2015 DKP Kab. Natuna (diolah)

Dari tabel diatas, dapat menunjukkan bahwa dari APBD Natuna tahun 2014 sebesar Rp.14.633.223.603,00 dengan realisasi sebesar Rp.11.277.613.403,00. Dikaitkan dengan pencapaian misi dan sasaran yaitu Tercapainya Optimalisasi Sektor Unggulan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.5.166.744.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.544.588.800,00 atau sebesar 87,96%. Berkembangnya Industri Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dengan anggaran sebesar Rp.7.137.407.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.643.002.884,00 atau sebesar 65,05%. Meningkatkan Kualitas

Aparatur Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp.2.329.072.603,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.090.021.719,00 atau sebesar 89,74%.

Tabel 3.12

Capai Kinerja Tahunan Berdasarkan Misi dan Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2016

MISI		SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI PERTAMA	Tujuan 1	Meningkatkan Usaha Pemanfaatan dan Pengolahan	94,48
Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Secara Optimal dan	Tercapainya Optimalisasi Sektor Unggulan Daerah		
MISI KEDUA	Tujuan 2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bidang Kelautan dan Perikanan	100
Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Hasil Perikanan	Berkembangnya Industri Berbasis Sumber Daya Alam (SDA)		
MISI KETIGA	Tujuan 3	Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Perikanan	98,35
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah		

Sumber: Lakip Tahun 2016 DKP Kab. Natuna (diolah)

Dari tabel 3.12 diatas, dapat menunjukkan bahwa dari APBD Natuna tahun 2014 sebesar Rp.26.120.264.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.24.793.069.539,00. Dikaitkan dengan pencapaian misi dan sasaran yaitu Tercapainya Optimalisasi Sektor Unggulan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.23.222.164.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.939.358.465,00 atau sebesar 94,48%. Berkembangnya Industri Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) menyerap anggaran sebesar Rp. 209.100.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 209.100.000,00 atau sebesar 100%. Meningkatnya Kualitas Aparatur

Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp.2.688.999.900,00 dengan realisasi menyerap anggaran sebesar Rp.2.644.611.078,00 atau sebesar 98,35%.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam menjawab pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dari tahun 2014-2016 telah berupaya menunjukkan rencana kerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai SKPD selama ini. Selanjutnya melakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan mulai dari tahun 2014-2016 telah menunjukkan suatu hal yang cukup bagus. Adanya komitmen bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan mampu untuk menjawab tantangan dan peluang yang akan diraih ke depannya. Tersedianya anggaran yang memadai dan sumber daya manusia mumpuni juga akan menunjukkan hasil kinerja yang baik, baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan bahkan hasil yang akan dicapai.
2. Hasil capaian kinerja dari tahun 2014-2016 menunjukkan kenaikan, walaupun terjadi penurunan pada tahun 2015 yang diakibatkan oleh

adanya penurunan APBD Natuna (defisit anggaran) sehingga mengakibatkan menurunnya alokasi anggaran yang diperuntukan sebagai program yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna. Alokasi anggaran yang pada tahun 2016 sebesar Rp. 26.120.264.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.793.069.539,00 dengan capaian kinerja mencapai angka yang cukup memuaskan, yaitu 94,92% dengan predikat penilaian “MEMUASKAN”.

3. Capai kinerja berdasarkan misi dan sasaran strategis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2016 menunjukkan adanya kenaikan dari alokasi anggaran, dimana menunjukkan bahwa tercapainya Optimalisasi Sektor Unggulan Daerah dengan menyerap anggaran sebesar Rp23.222.164.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 21.939.358.465,00 atau sebesar 94,48%. Berkembangnya Industri Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) menyerap anggaran sebesar Rp. 209.100.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 209.100.000,00 atau sebesar 100%. Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah menyerap anggaran sebesar Rp.2.688.999.900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.644.611.078,00 atau sebesar 98,35%.